

## BAB II

### TINJAUAN PUSAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Mulia (2020) dalam penelitiannya dengan judul “*Efektivitas Program Inovasi Desa Berbasis Masyarakat di Kabupaten Serang Penerapan Program Inovasi Desa (PID) di Kabupaten Serang*” memiliki prioritas utama pada pengembangan kelompok tani dengan fokus pada peningkatan skala pasar. Berdasarkan analisis menggunakan metode AHP (*Analytical Hierarchy Process*), ditemukan bahwa komunitas petani lebih mengutamakan pengembangan skala pasar. Tingkat konsistensi program ini ditunjukkan dengan nilai indeks konsistensi sebesar 0,04 dan *Consistency Ratio* (CR) sebesar 0,90, yang mengindikasikan bahwa program ini memiliki tingkat efektivitas yang baik dalam implementasinya. Prioritas ini sejalan dengan tujuan PID guna mendukung produktivitas dan perkembangan perekonomian desa melalui program pembangunan dan penguatan kapasitas masyarakat, khususnya pengembangan area pertanian dan distribusi hasil panen.

Nurwanda & Badriah (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “*Analisis Program Inovasi Desa Dalam Mendorong Pengembangan Ekonomi Lokal Oleh Tim Pelaksana Inovasi Desa (PID) Di Desa Bangunharja Kabupaten Ciamis*” menggunakan metode kualitatif deskriptif belum berjalan optimal meskipun telah mengikuti tiga pilar keberhasilan program menurut teori Jones. Beberapa kendala yang ditemukan antara lain kurangnya pengarahan dan pendampingan tim kepada masyarakat, TPID belum mampu mengelola program yang tepat guna dalam pengaturan pengetahuan dan pembaruan desa, tidak adanya sosialisasi program yang mengakibatkan program pengembangan wirausaha masih perlu ditinjau kembali. Meskipun TPID telah melaksanakan program sesuai perencanaan, namun dalam implementasinya masih terdapat kekurangan sehingga manfaat program belum dapat dirasakan secara menyeluruh oleh perangkat desa dan pelaku usaha.

Dwiningwarni et al., (2023) dalam penelitiannya dengan judul

*“Implementasi Program Inovasi Desa Untuk Meningkatkan Kemandirian Desa Di Kabupaten Jombang”* menggunakan metode penelitian analisis kualitatif. Implementasi Program Inovasi Desa (PID) di Kabupaten Jombang memerlukan tiga strategi utama untuk meningkatkan kemandirian desa. Pertama, strategi pengembangan kelembagaan yang meliputi peningkatan kualitas SDM, penyusunan struktur organisasi yang sesuai, evaluasi berkala dan lain - lain. Kedua, strategi fasilitas yang mencakup penyusunan laporan realisasi anggaran desa, pemberian *reward* bagi desa pelaksana PID, dan pelatihan pembukuan bagi pengelola. Ketiga, strategi pelayanan yang meliputi penguatan kolaborasi dengan mitra eksternal guna memaksimalkan kemampuan kompetisi, peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan inovatif, serta pemberian motivasi kepada seluruh desa untuk mengikuti program PID. Berdasarkan analisis SWOT Kabupaten Jombang masih memerlukan pengembangan di bidang kelembagaan, fasilitas, dan pelayanan.

Wahyuvi & Kriyantono (2020) dalam penelitiannya yang berjudul *“Pola komunikasi pembangunan terkait pengelolaan program inovasi desa menuju pemberdayaan masyarakat”* menggunakan metode deskriptif kualitatif masih menghadapi beberapa kendala dalam implementasinya. Peran penting Kepala Desa sebagai komunikator utama sangat penting pada saat informasi program disampaikan. Namun, informasi yang disampaikan tidak merata kepada seluruh masyarakat sehingga mempengaruhi tingkat partisipasi. Program yang dijalankan belum optimal karena keterbatasan informasi dan diperlukan rancangan model komunikasi partisipatori yang melibatkan forum komunikasi, penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa, penampungan usulan masyarakat, serta penerapan difusi dan adopsi inovasi yang didukung komunikasi partisipatori untuk mendorong keterlibatan masyarakat baik secara gotong royong maupun melalui sistem Padat Karya Tunai.

Karuniyati et al., (2021) dalam penelitiannya dengan judul *“Strategi Kemandirian Melalui Program Inovasi Desa Kuala Sempang Kabupaten Bintan”* menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif menunjukkan telah cukup optimal. Dari tiga aspek yang diteliti: pertama, cara hidup masih mencerminkan keeratan budaya lokal dengan

adanya dukungan masyarakat terhadap program yang dijalankan; kedua, resiliensi ekonomi telah menunjukkan peningkatan dari periode terakhir namun masih menghadapi tantangan seperti kurangnya kemampuan manajemen dan minimnya pemahaman masyarakat dalam berpartisipasi; ketiga, aspek lingkungan dan sarana prasarana masih menghadapi tantangan terutama pada kondisi jalan dan jembatan penghubung antar dusun yang belum memadai. Meskipun demikian, potensi desa telah cukup menghasilkan pengaruh baik bagi perbaikan taraf hidup masyarakat jika dikelola secara optimal. Tantangan utama yang masih dihadapi adalah kurangnya kemampuan manajemen, kurangnya pemahaman masyarakat untuk ikut serta dalam program, serta kurang efektifnya pengembangan program dalam kehidupan sehari-hari.

Majid & Arsyiah (2023) dalam penelitiannya dengan judul “*Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Inovasi Desa (PID) di Desa Lipu Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Selatan*” menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif belum berjalan maksimal. Pertama, mutu dan jumlah keterlibatan masyarakat yang mengalami penurunan karena kurangnya peran pemerintah desa pada tahap penyusunan rencana dan implementasi program, karena itu masyarakat sekedar fokus dengan kegiatan pribadi. Kedua, penyusunan rencana program pemberdayaan belum optimal karena minimnya komunikasi dan sosialisasi dari pemerintah desa. Ketiga, pelaksanaan program masih terhambat, terlihat dari kendala dalam perekrutan anggota BUMDesa dan belum maksimalnya pemanfaatan potensi sumber daya desa. Keempat, keterlibatan dan evaluasi berkelanjutan antara pemerintah desa dan masyarakat belum terlaksana dengan baik karena program-program yang direncanakan belum sepenuhnya berjalan. Program yang saat ini sedang dijalankan hanya sebatas pengambilan air bersih, pemeliharaan adat, serta pengelolaan BUMDesa galon, namun dalam implementasinya masih menghadapi berbagai kendala teknis dan partisipasi.

Sakti (2021) dalam penelitiannya dengan judul “*Evaluasi Strategi Komunikasi Kementerian Desa-Pdtt Dalam Membangun Awareness Program Inovasi Desa Tahun 2018-2019 (Studi Kasus Di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat)*” menggunakan metode pendekatan kualitatif. Strategi pada penelitian

ini menggunakan 2 pendekatan utama. Pertama, komunikasi langsung melalui media massa yang dipilih untuk menyampaikan pesan dan informasi dari Kementrian untuk masyarakat desa melalui siaran televisi atau hasil wawancara. Kedua, komunikasi tidak langsung yang bersifat struktural, dimana informasi mengalir dari Kementerian Desa-PDPT ke Pemerintah Provinsi, kemudian ke Pemerintah Kabupaten/Kota, hingga akhirnya sampai ke masyarakat desa melalui aparat desa. Selain itu, strategi perluasan pesan juga diterapkan dalam dua bentuk: pesan kebijakan struktural yang disampaikan melalui rapat koordinasi berjenjang, dan pesan inovatif yang disebarkan melalui media massa. Meski demikian, penelitian merekomendasikan perlunya intensifikasi koordinasi antara Kementerian dengan pemerintah daerah serta pelibatan mitra strategis lain seperti BUMN dan swasta untuk memperluas jaringan komunikasi.

Rizki et al., (2023) dalam penelitiannya dengan judul “*Inovasi Pemerintah Desa Bandung dalam Upaya Pelaksanaan Program Inovasi Desa*” dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif menunjukkan bahwa program yang dijalankan telah menghasilkan berbagai inovasi yang berhasil mendorong kreativitas dan pemberdayaan masyarakat desa. Beberapa inovasi yang telah diterapkan antara lain: pembuatan *website* desa untuk memudahkan akses informasi, layanan jemput bola (jempol) untuk membantu masyarakat yang kesulitan mengakses layanan administrasi, layanan mandiri online (mandolin) untuk pengurusan surat-menyurat secara daring, sistem absensi berbasis barcode untuk perangkat desa, aplikasi pengelolaan keuangan BUMDes, saung *restorative justice* untuk penyelesaian perkara pidana ringan secara kekeluargaan, program santunan kematian, *marketplace* desa untuk pemasaran produk lokal, dan perpustakaan digital. Program-program inovatif ini didukung oleh APBDesa dan PADes serta memanfaatkan potensi lokal berupa hasil perkebunan seperti pandan cucuk yang diolah menjadi berbagai produk kerajinan. Melalui berbagai inovasi tersebut, Desa Bandung berupaya meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat

Monica (2020) dalam penelitiannya dengan judul *Efektivitas Program Inovasi Desa di Nagari Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman*

*Barat* yang dilakukan dengan metode penelitian kualitatif deskriptif menjelaskan bahwa implementasi Program Inovasi Desa (PID) belum berjalan optimal. Berdasarkan indikator efektivitas Duncan, program ini belum berjalan optimal dilihat dari keberhasilan tujuan dan kolaborasi. Program tersebut mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan karena Tim Pelaksana Inovasi Kecamatan yang belum maksimal dan adanya inovasi yang tidak berhasil. Pada aspek integrasi, ditemukan kurangnya sosialisasi dan kerja sama yang memadai antar pelaksana program. Namun, dari sisi adaptasi program sudah berjalan efektif karena pelaksana program telah bekerja sesuai aturan dan pedoman yang ditetapkan. Program ini juga menghadapi kendala internal berupa kurangnya pemahaman pelaksana program tentang mekanisme pelaksanaan, serta kendala eksternal seperti rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan, ditambah dengan minimnya anggaran dari kecamatan untuk mendukung kegiatan program inovasi desa.

Sudianing & Sandiasa (2020) dalam penelitiannya dengan judul *Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Program Inovasi Desa (Di Desa Uma Anyar Dan Desa Tejakula)* dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, dengan menggunakan dana desa, program ini telah berhasil menciptakan pengembangan desa yang komprehensif dan berkelanjutan. Kedua, program ini juga telah membuktikan dirinya sebagai kunci pengembangan desa dan pemberdayaan masyarakat melalui tiga aspek. Ketiga, tingkat keikutsertaan masyarakat dalam peningkatan pembangunan program tersebut sangat tinggi, yang ditunjukkan melalui berbagai bentuk kegiatan. Meski demikian, program ini masih memerlukan transformasi rencana operasional khusus guna program pembangunan desa yang lebih inovatif, peningkatan kemampuan pemerintahan desa dan fasilitator, serta pengembangan infrastruktur yang berlandaskan pada potensi desa yang dimiliki.

## **2.2 Kerangka Teori**

### **2.2.1 Kebijakan**

Menurut Carl J Federick kebijakan adalah serangkaian kegiatan yang diajukan oleh individu, golongan, atau pemerintah dalam konteks sosial

khusus, di mana ada peluang ataupun hambatan guna mewujudkan gagasan tersebut demi meraih tujuan yang diinginkan. Pemikiran ini menekankan bahwa kebijakan bukan sekadar gagasan abstrak, melainkan bentuk perilaku yang memiliki maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan harus berorientasi pada tindakan nyata dan diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada (Agustino, 2008).

James E Anderson (1978) menjelaskan bahwa kebijakan merupakan rangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu, yang dilakukan secara konsisten oleh individu maupun kelompok dalam upaya menyelesaikan suatu permasalahan. Budi Winarno (2007) menegaskan bahwa konsep Anderson lebih relevan sebab menitikberatkan atas apa yang benar-benar dijalankan pemerintah, bukan hanya pada apa yang direncanakan. Anderson juga membedakan secara jelas antara kebijakan (*policy*) dan keputusan (*decision*), di mana kebijakan bersifat strategis dan berjangka panjang, sedangkan keputusan berkaitan dengan pemilihan alternatif tertentu dalam proses kebijakan.

George C. Edward III (dalam Agustino, 2006:149) menjelaskan bahwa kebijakan yang diimplementasikan dipengaruhi beberapa faktor yaitu:

1. Komunikasi (*communication*). faktor pertama yang menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan suatu kebijakan ialah komunikasi. Ia menegaskan bahwa komunikasi mempunyai peran penting untuk menentukan sejauh mana tujuan kebijakan publik dapat tercapai. Pelaksanaan kebijakan akan berlangsung efektif apabila para pengambil keputusan memahami secara jelas apa yang harus dilakukan. Pemahaman tersebut hanya dapat diperoleh jika tahap komunikasi terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, setiap keputusan dan ketentuan pelaksanaan kebijakan perlu disampaikan kepada pihak atau personel yang tepat. Selain itu, pesan kebijakan yang disampaikan harus bersifat jelas, tepat, serta konsisten agar para pelaksana dan pembuat keputusan dapat bekerja secara selaras dalam mengimplementasikannya di masyarakat. Tiga aspek yang dapat

dijadikan indicator untuk menilai sejauh mana keberhasilan komunikasi ialah:

A. Transmisi, Proses penyampaian informasi yang efektif akan berdampak langsung pada keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Namun, dalam praktiknya sering muncul kesalahpahaman (miskomunikasi) akibat pesan yang harus melewati banyak lapisan birokrasi. Akibatnya, makna atau maksud awal dari pesan tersebut kerap mengalami distorsi dalam proses pelaksanaan.

B. Kejelasan, Informasi kebijakan yang diterima oleh pelaksana di lapangan harus disampaikan secara jelas dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Ketidakjelasan pesan memang terkadang memberikan ruang fleksibilitas bagi pelaksana, tetapi di sisi lain dapat menyebabkan penyimpangan dari tujuan kebijakan yang sudah diputuskan.

C. Konsistensi, instruksi untuk pelaksana kebijakan yang diberikan perlu bersifat konsisten dan tegas. Jika arahan sering berubah, maka akan memunculkan kebingungan di lapangan dan menghambat pelaksanaan kebijakan secara optimal.

2. Sumber daya menjadi faktor kedua yang berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam proses implementasi, sumber daya menjadi bagian esensial yang meliputi sejumlah elemen penting untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan:

A. Sumber daya manusia, pada pelaksanaan kebijakan salah satu unsur utama yang menentukan berhasil atau tidaknya implementasi ialah sumber daya manusia. Kegagalan sering terjadi disebabkan oleh kurangnya kebutuhan staf atau kurangnya kompetensi dalam bidangnya. Oleh karena itu, peningkatan jumlah staf saja tidak cukup; dibutuhkan pula tenaga yang memiliki keahlian serta kemampuan yang sesuai agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan efektif.

- B. Anggaran, memiliki peran penting dalam menjamin keberlangsungan pelaksanaan kebijakan. Kecukupan dana atau modal menjadi syarat utama agar suatu program dapat terlaksana dengan baik. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan sulit mencapai tujuan secara optimal dan cenderung tidak berjalan efektif.
- C. Wewenang, merupakan aspek formal yang memberikan legitimasi bagi pelaksana kebijakan untuk bertindak. Kewenangan yang jelas memungkinkan perintah dilaksanakan dengan tepat. Sebaliknya, ketika pelaksana tidak memiliki dasar wewenang yang kuat, maka legitimasi di mata publik melemah dan berpotensi membatalkan tahap implementasi kebijakan.
- D. Fasilitas menjadi salah satu faktor penunjang pada berhasil atau tidaknya kebijakan yang diimplementasikan. Meskipun pelaksana memiliki jumlah staf yang cukup, memahami tugasnya, serta memiliki kewenangan yang sah, tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai, kebijakan tetap sulit terlaksana dengan baik.
3. Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan berperan sebagai faktor ketiga yang turut menentukan keberhasilan proses pelaksanaan suatu kebijakan. Agar suatu kebijakan bisa dijalankan dengan baik, pelaksana harus mempunyai keterampilan dan kapasitas untuk melaksanakan tidak hanya hanya mengetahui apa yang harus dikerjakan, sehingga pelaksanaan di lapangan tidak mengalami penyimpangan. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam variabel disposisi meliputi hal-hal berikut:
- A. Dalam proses pengangkatan birokrat, sikap dan disposisi pelaksana sering kali menjadi sumber hambatan jelas bagi keberhasilan implementasi kebijakan yang diharapkan oleh pejabat tinggi. Oleh sebab itu, pemilihan serta penetapan pelaksana kebijakan perlu dilakukan dengan penuh kehati-hatian dengan mempertimbangkan aspek integritas, loyalitas,

dan komitmen yang kuat terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, terlebih kebijakan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

B. Insentif, Salah satu cara yang dinilai efektif guna mengurangi sikap negatif pelaksana kebijakan ialah dengan menerapkan sistem pengelolaan insentif. Pada dasarnya, setiap individu memiliki dorongan untuk bertindak sesuai dengan kepentingannya sendiri, sehingga penetapan insentif yang tepat oleh pembuat kebijakan dapat memengaruhi perilaku dan meningkatkan kinerja pelaksana. Pemberian keuntungan tambahan atau penambahan beban tertentu dapat menjadi pendorong agar pelaksana menjalankan tugasnya dengan baik, baik demi kepentingan pribadi maupun organisasi.

4. Struktur Birokrasi. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik sangat bergantung pada efektivitas struktur birokrasi. Walaupun sumber daya yang dibutuhkan telah tersedia, pelaksana memahami tanggung jawabnya, serta memiliki komitmen dalam menjalankan tugas, implementasi kebijakan masih dapat mengalami hambatan apabila struktur birokrasi tidak berjalan secara optimal. Kebijakan yang bersifat kompleks membutuhkan koordinasi dari banyak pihak, sehingga apabila struktur birokrasi tidak mendukung, efektivitas sumber daya akan menurun dan pelaksanaan kebijakan menjadi tidak optimal. Sebagai pelaksana kebijakan, birokrasi seharusnya mampu mendukung keputusan politik melalui koordinasi yang baik. Dua faktor utama dalam struktur birokrasi ialah:

A. Standar Operating Prosedure (SOP) ialah pedoman kegiatan yang berfungsi membantu aparatur atau pelaksana kebijakan dalam menjalankan tanggung jawab rutinnnya agar sesuai dengan aturan dan standar kerja yang berlaku.

B. Fragmentasi ialah proses pembagian tanggung jawab dan kegiatan kerja di antara berbagai unit atau bagian organisasi agar

pelaksanaan tugas menjadi lebih terarah dan terdistribusi dengan baik.

**Gambar 2. 1 Model Implementasi Kebijakan Edward III**



*Sumber : Diolah Peneliti 2025*

### 2.2.2 Program

JoanL.Herman dalam buku (Tayibnapi, 2008) menyatakan bahwa program didefinisikan sebagai strategi atau kegiatan yang dijalankan oleh seseorang dengan maksud untuk mencapai hasil atau pengaruh yang diinginkan. Program ini dirancang untuk mencapai hasil yang diinginkan, baik berupa perubahan, manfaat, atau pengaruh tertentu. Fokus utama dari sebuah program adalah pada pelaksanaan kegiatan yang sistematis dan terarah, dengan demikian tujuan yang direncanakan dapat tercapai dengan optimal. Dengan kata lain, program bertujuan untuk menjembatani antara ide atau tujuan awal dengan hasil yang jelas melalui tindakan yang nyata.

Menurut Tayibnapi (2008) program merupakan rencana atau kegiatan yang disusun secara sistematis oleh individu dengan tujuan mencapai hasil dan memberikan pengaruh positif. Program muncul dari kebutuhan untuk menyelesaikan masalah, mencapai peluang, atau

menciptakan perubahan dalam suatu kondisi yang ada. Dalam prosesnya, program mencakup pengorganisasian sumber daya, baik manusia, finansial, maupun material, yang disusun secara strategis untuk mendukung pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Dengan demikian, program bukan hanya sekedar aktivitas biasa, melainkan suatu inisiatif yang terstruktur dengan arah dan hasil yang jelas, yang sering kali melibatkan berbagai pihak dan elemen untuk memastikan keberhasilannya.

Hasibuan (2006) juga mengatakan program adalah jenis rencana khusus yang memiliki tujuan, aturan, proses, anggaran, dan jadwal pelaksanaan yang telah ditentukan sebelumnya sehingga hal ini membuatnya jelas dan nyata. Dalam sebuah program, terdapat kejelasan mengenai apa yang ingin dicapai, aturan-aturan yang harus diikuti, langkah-langkah proses yang wajib dijalankan, kebutuhan sumber daya, serta alokasi anggaran yang telah ditentukan. Selain itu, program dilengkapi dengan jadwal pelaksanaan yang rinci, sehingga setiap tahap kegiatan memiliki waktu yang jelas untuk dilaksanakan. Elemen-elemen ini membuat program menjadi lebih terarah dan memungkinkan pengukuran keberhasilan berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, program tidak hanya menjadi sebuah gagasan, tetapi juga wujud nyata dari upaya untuk mencapai perubahan atau hasil tertentu.

### **2.2.3 Program Inovasi Desa**

Program Inovasi Desa (PID) ialah inisiatif pemerintah yang bertujuan guna memajukan kesejahteraan masyarakat desa dengan pengembangan rencana desa dan pelaksanaannya. Program ini memiliki tiga tujuan utama, yaitu pengembangan sektor kewirausahaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengadaan sarana dan prasarana desa (Nurgiarta & Rosdiana, 2019). Melalui peningkatan infrastruktur, pertumbuhan bisnis, dan pendidikan, desa akan mampu merencanakan dan melaksanakan proyek pembangunan yang lebih tepat dan optimal, yang pada akhirnya akan memajukan taraf hidup

masyarakat (Mulia, 2020a).

a. Tujuan dan Sasaran Program Inovasi Desa

Program Inovasi Desa merupakan strategi komprehensif guna memberdayakan dan mengembangkan potensi masyarakat desa secara berkelanjutan. Tujuan utama program ini ialah meningkatkan kemampuan masyarakat desa untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik melalui pendekatan inovatif yang mendorong partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat (Petunjuk Teknis Pelaksanaan PID, 2019). Program ini dirancang untuk mentransformasi pembangunan desa dari model konvensional menuju pendekatan yang lebih partisipatif, kreatif, dan berbasis potensi lokal, dengan fokus utama pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia, penciptaan ekosistem ekonomi produktif, dan pembangkitan inovasi strategis di tingkat akar rumput.

Secara khusus, tujuan Program Inovasi Desa mencakup pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengidentifikasian dan pengoptimalan potensi ekonomi, pengembangan infrastruktur dan teknologi tepat guna, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa, serta penciptaan sistem pelayanan publik yang transparan dan responsif. Program ini berupaya membangun masyarakat desa yang mandiri melalui pendekatan inklusif, dengan mendorong munculnya kepemimpinan lokal yang inovatif, memfasilitasi akses permodalan, mengembangkan kelompok ekonomi produktif, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ide-ide kreatif. Melalui serangkaian intervensi strategis, Program Inovasi Desa bertujuan menghasilkan transformasi sosial yang berkelanjutan, mengangkat potensi lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh.

Secara khusus Program Inovasi Desa bertujuan untuk :

- 1) Meningkatkan efisiensi pemanfaatan dana desa dengan manajemen pengetahuan yang dilakukan secara terstruktur, terarah, dan melibatkan partisipasi berbagai pihak.

- 2) Mengembangkan kemampuan pemerintah desa untuk menyusun dan menjalankan program pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa dengan lebih kreatif dan lebih bernilai.
- 3) Mewadahi penguatan kemampuan desa dengan menggunakan layanan P2KTD guna mendukung peniruan atau penerapan proyek Inovasi Desa.
- 4) Mengembangkan kemampuan kepengurusan anggota pemberdayaan masyarakat desa untuk memenuhi keperluan fasilitas sosial dasar masyarakat setempat.

Sasaran Program Inovasi Desa pada dasarnya difokuskan pada peningkatan kapasitas masyarakat desa dan pengembangan potensi lokal secara menyeluruh. Program inovasi desa dirancang sebagai kebaruan untuk mentransformasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan fokus utama pada pengoptimalan penggunaan dana desa. Konsep utamanya adalah mengalihkan paradigma pembangunan dari infrastruktur fisik tradisional menuju pengembangan ekonomi lokal yang lebih berkelanjutan.

Sasaran dari Program Inovasi Desa ini mencakup seluruh lapisan masyarakat desa yang terpilih, dengan tujuan menciptakan ekosistem ekonomi yang berrgerak dan mandiri. Melalui pendekatan inovatif, program bertujuan memberdayakan potensi lokal, mendorong prakarsa masyarakat, dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas. Karakteristik utama program adalah menggeser alokasi dana dari pembangunan infrastruktur fisik yang selama ini kurang efektif menuju investasi langsung pada pengembangan ekonomi lokal, pembinaan ekonomi masyarakat, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa (Petunjuk Teknis Pelaksanaan PID, 2019). Tujuan akhirnya adalah memberdayakan masyarakat desa agar mampu mengidentifikasi, mengembangkan, dan mengelola potensi ekonomi mereka sendiri secara mandiri dan berkelanjutan.

b. Manfaat Program Inovasi Desa

Manfaat Program Inovasi Desa meliputi empat aspek utama yang dirancang untuk mengembangkan dan memberdayakan potensi desa (Petunjuk Teknis Pelaksanaan PID, 2019).

- 1) Program ini memberikan kesempatan kepada desa untuk saling bertukar pengalaman dan pengetahuan tentang praktik-praktik peningkatan dan pengembangan masyarakat yang inovatif. Melalui wadah ini, setiap desa dapat belajar dari keberhasilan dan pengalaman desa lainnya, sehingga dapat mengadopsi strategi-strategi pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
- 2) Program Inovasi Desa menyediakan pendampingan untuk membantu desa mempersiapkan dan melakukan kegiatan pembangunan yang lebih inovatif. Fokusnya adalah pada kepentingan utama masyarakat desa, menunjang program-program strategis pemerintah dan mengembangkan solusi pembangunan yang disesuaikan dengan konteks lokal
- 3) Tersedianya jasa layanan teknis bertujuan guna memajukan mutu kegiatan peningkatan dan pengembangan kemampuan masyarakat desa.
- 4) Program ini membuka akses dan kesempatan bagi desa untuk meningkatkan kapasitas ekonomi lokal, Mengembangkan potensi-potensi ekonomi yang dimiliki dan menciptakan aktivitas produktif yang dapat memajukan taraf hidup masyarakat desa

c. Prinsip Pengelolaan Program Inovasi Desa

- 1) Taat Hukum
- 2) Transparasi
- 3) Akuntabilitas
- 4) Partisipatif
- 5) Inklusif
- 6) Kesetaraan Gender

d. Dasar Hukum Program Inovasi Desa

Inovasi daerah diatur dalam satu bab khusus Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Bab tersebut menyatakan bahwa Pemerintah Daerah diperbolehkan melakukan inovasi sebagai upaya meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Febrian, 2018). Dalam mendukung program inovasi desa, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan dan regulasi. Undang Nomor 6 Tahun 2014 memfokuskan pada pentingnya pengembangan kemampuan desa guna menyusun strategi dan melaksanakan pembangunan desa yang unggul menjadi landasan strategi Program Inovasi Desa (PID) Indonesia.

Kebijakan Program Inovasi Desa di Indonesia diperkuat oleh Peraturan Menteri Desa Nomor 48 Tahun 2018 yang mengatur Pedoman Umum Program Inovasi Desa. Melalui kebijakan ini pemerintah menetapkan 3 fokus utama yaitu memprioritaskan pengembangan sektor kewirausahaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengadaan sarana dan prasarana desa. Tujuan akhir dari program inovasi desa ini berorientasi pada kemajuan akselerasi pengembangan desa yang lebih baik, memajukan kesejahteraan masyarakat dengan pengembangan ekonomi lokal, penguatan kapasitas SDM dan infrastruktur, serta peningkatan kapabilitas teknis dan profesionalisme dalam tata kelola pemerintahan desa.

**2.2.4 Program Bantuan Masyarakat Prasejahtera**

Program Bantuan Lauk Pauk Masyarakat Prasejahtera ini merupakan program Pemerintah Desa Junrejo sebagai pelaksanaan Program Inovasi Desa untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari. Bantuan ini diberikan kepada masyarakat prasejahtera yang diwujudkan dalam bentuk kupon dan diberikan secara berkala setiap bulannya. Setiap penerima manfaat bantuan ini dapat langsung mengambil kupon di kantor Desa Junrejo pada waktu yang telah ditentukan. Kupon

kemudian dapat ditukarkan dengan berbagai pilihan lauk pauk pada mlijo yang berlokasi dekat dengan tempat tinggal penerima manfaat sehingga memberikan kebutuhan bagi masyarakat prasejahtera dalam memenuhi kebutuhan makanan sehari – hari.

Bantuan Transportasi bagi siswa - siswi prasejahtera juga merupakan program yang tak kalah pentingnya. Program ini berperan besar dalam mendukung mobilitas dan akses pendidikan bagi masyarakat Desa Junrejo yang kurang mampu atau prasejahtera (Beritaplus, 2021). Siswa – siswi prasejahtera dapat dengan mudah bersekolah menggunakan transportasi atau ojek yang telah disiapkan oleh Pemerintah Desa Junrejo. Program ini juga telah bermitra dengan ojek setempat yang secara rutin mengantarkan siswa - siswi dari rumah ke sekolah dan menjemput kembali setelah jam sekolah berakhir. Bantuan transportasi ini juga tidak terbatas pada siswa-siswi yang bersekolah di dalam Kota Batu, tetapi juga diperuntukkan bagi siswa-siswi yang berkuliah di luar Kota Batu yang seringkali mengalami hambatan dalam biaya transportasi.

Program bantuan terakhir yang tak kalah penting yang dilakukan Pemerintah Desa Junrejo adalah Program Bantuan Berobat bagi Masyarakat Prasejahtera. Program ini secara khusus diberikan kepada masyarakat miskin yang terdaftar sebagai penerima kartu BPJS PBI JKN, yang seringkali mengalami kesulitan dalam memperoleh layanan kesehatan. Program ini diberikan sebagai upaya Pemerintah Desa Junrejo dalam membantu masyarakat prasejahtera yang mengalami sakit keras dan menghadapi kesulitan biaya transportasi saat melakukan kontrol ke rumah sakit. Bantuan ini diberikan langsung oleh Pemerintah Desa Junrejo dalam bentuk uang tunai yang dialokasikan khusus untuk keperluan transportasi berobat. Program ini sangat membantu masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi atau bertempat tinggal jauh dari pusat layanan kesehatan maupun rumah sakit, sehingga masyarakat prasejahtera dapat dengan mudah mendapatkan perawatan medis tanpa terkendala biaya transportasi.

Pemerintah desa berupaya membantu meringankan beban masyarakat prasejahtera dan menjaga kesejahteraan masyarakatnya, terutama dalam hal akses kesehatan (Lucky Aditya, 2022).

#### **2.2.5 Pemerintah Desa**

Menurut Saparin (1972) Pemerintah Desa ialah lambang sah kesatuan masyarakat desa. Desa dalam pemerintahannya dipimpin oleh seorang kepala desa dan didukung oleh wakil wakilnya atau aparatur desa yang berperan sebagai perantara masyarakat desa dalam hubungan di dalam maupun luar. Pemerintahan Desa adalah unit dari Pemerintahan pusat yang pelaksanaannya menekankan pada wilayah pedesaan. Menurut Surasih (2006) Pemerintah Desa merupakan suatu prosedur di mana upaya masyarakat desa dipadukan dengan inisiatif pemerintah untuk memajukan kualitas hidup masyarakat. Sedangkan Pemerintah Desa menurut A.W Wijaya (1976) dalam bukunya mengatakan bahwa pemerintah desa ialah salah satu bagian dari struktur ketatanegaraan, oleh karena itu desa memiliki otoritas guna menata dan mengusahakan kepentingan masyarakat setempat. Kepala desa memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan kinerja kepada Badan Permusyawaratan Desa dan melaporkan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Bupati.